

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Cetakan Pertama. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bambang Purnomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Amarta, Yogyakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan*. Cetakan Ketiga. Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Pertama. Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- CST Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Cetakan Ketiga. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Dorothea Wahyu Ariani. *Pengertian Dasar Bisnis, Kewirausahaan dan Lingkungan Bisnis*. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2014.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986.
- Ida Bagus Anggrapurana Pidada et al. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan Pertama. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

- Jan Michiel Otto. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Cetakan Pertama. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- K. Wantjik Saleh. *Kehakiman dan Keadilan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. Cetakan Pertama. KPK, Jakarta, 2009.
- Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Cetakan Pertama. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- M. Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Remadja Rosda Karya, Bandung, 1986.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan Keenam. Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Oemar Seno Adji. *Herziening-Ganti Rugi Suap, Perkembangan Delik*. Crown Publishers, Jakarta, 1981.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Cetakan Pertama. Sinar Baru, Bandung, 1983.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Cetakan Keempat. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy Os Hiarej. *Menjerat Korupsi Partai Politik*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.

B. Jurnal

Andreas Nathaniel Marbun. "Suap di Sektor Swasta". *Jurnal Integritas Nomor 1 Tahun 2017*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2017.

Claudia Permata Dinda, Usman dan Tri Imam Munandar. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". *PAMPAS: Journal of Criminal Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020*. Jambi, 2020.

Eddy O.S. Hiariej. "Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Korporasi". *Masalah-masalah Hukum Nomor 4 Tahun 2020*. Semarang, 2020.

Fariz Cahyana. "Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Juris-Diction Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020*. Malang, 2020.

Hendri Diansah, Usman dan Yulia Monita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding". *PAMPAS: Journal of Criminal Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022*. Jambi, 2022.

Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan KUHP". *Jurnal Magister Hukum Udayana Nomor 2 Tahun 2013*. Bali, 2013.

Rahmi Zilvia dan Haryadi. "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan". *PAMPAS: Journal of Criminal Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020*. Jambi, 2020.

Sintia Febriani dan Sahuri Lasmadi. "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti". *PAMPAS: Journal of Criminal Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020*. Jambi, 2020.

Vidya Prahassacitta. "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia dan Korea

Selatan”. *Jurnal Hukum dan Pembaharuan Nomor 4 Tahun 2017*. Jakarta, 2017.

Wendy dan Andi Najemi. “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”. *PAMPAS: Journal of Criminal Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020*. Jambi, 2020.

Yetni Garnasih. “Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003”. *Jurnal Hukum Prioris Volume 2 Nomor 2 Tahun 2009*. Jakarta, 2009.

C. Seminar

Syamas Ardisasmita. “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta 23 Agustus 2006.

D. Artikel

Ananda. 2021. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 8 Juni 2022 pukul 17.03.

Binus University. 2016. “Mengaadopsi UNCAC Dalam Penyuapan di Sektor Privat Melalui Non-Legislati”. <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/29/mengadopsi-uncac-dalam-penyuapan-di-sektor-privat-melalui-non-legislasi/>, diakses pada 13 Februari 2023 pukul 15.03.

Dictio. 2017. “ApaYang Dimaksud Dengan Penyuapan?”. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517/4>, diakses pada 25 Januari 2023 pukul 12.15.

Hukum Online. 2009. “Suap di Sektor Swasta Belum Terjamah Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/suap-di-sektor-swasta-belum-terjamah-hukum-hol21210/>, diakses pada 2 Mei 2022 pukul 12.27.

Hukum Online. 2008. “Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional-hol19356>, diakses pada 2 Februari 2023 pukul 15.02.

- Komisi Hukum.
http://www.komisi hukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=110, diakses pada 15 Februari 2023 pukul 15.03.
- Manajemen Rumah Sakit. 2015. “Eksklusif: Suap Obat, Bos Rumah Sakit Blak-blakan Terima Duit”.
<https://manajemenrumahsakit.net/2015/11/eksklusif-suap-obat-bos-rumah-sakit-blak-blakan-terima-duit/>, diakses pada 13 Februari 2023 pukul 14.27.
- Muhammad Yusuf. 2013. “Mengapa Korupsi Tetap Tumbuh Subur?.”
https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, diakses pada 29 April 2022 pukul 18.30.
- Pikiran Rakyat. 2022. “Data KPK: Pelaku Korupsi 2004-2022 Didominasi Pengusaha”.
<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015938891/data-kpk-pelaku-korupsi-2004-2022-didominasi-pengusaha>, diakses pada 10 Februari 2023 pukul 14.26.
- Supply Chain. 2018. “Dugaan Korupsi Sektor Swasta Dalam Bidang Logistik”.
<https://supplychainindonesia.com/dugaan-korupsi-sektor-swasta-dalam-bidang-logistik-bagian-1-dari-3-tulisan/>, diakses pada 16 Februari 2023 pukul 02.29.
- United Nations Covention Against Corruption. 2003.
https://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf, diakses pada 15 Februari 2023 pukul 14.50.
- Wikipedia. 2022. “Swasta”. <https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta>, diakses pada 14 November 2022 pukul 16.11.
- Willy Masaharu. 2021. “KPK: Sektor Swasta Peringkat Tertinggi Kasus Korupsi”. <https://www.beritasatu.com/archive/807239/kpk-sektor-swasta-peringkat-tertinggi-kasus-korupsi>, diakses pada 1 Juni 2022

pukul 11.54.